

LAPORAN AKHIR MAGANG

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PELAPORAN KEUANGAN MERARE
PADA BPKAD KOTA KENDARI**



Helmalia Ainun Putri

Student Number : 22312258

Dosen Pembimbing :

Arief Rahman S.E., M.Com., Ph.D.

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Helmalia Ainun Putri

NIM : 22312258

Program Studi : Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan
Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Judul Kegiatan : Analisis Implementasi Sistem Pelaporan Keuangan
MERARE Pada BPKAD Kota Kendari

Dengan Ini Menyatakan Bahwa:

1. Laporan Akhir Magang ini merupakan tulisan asli saya sendiri tanpa bantuan orang lain, selain pembimbing dan narasumber yang terkait.
2. Laporan Akhir Magang ini seluruhnya belum pernah dipublikasi dalam bentuk apapun di Universitas Islam Indonesia, maupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Dalam Laporan Akhir Magang ini tidak dapat terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai rujukan dalam naskah dan tercantum pada daftar pustaka.

Kendari, 11 Maret 2026



Helmalia Ainun Putri

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan juga hidayahnya, sehingga saya dapat menyusun dan menyelesaikan proposal magang ini dengan judul “**Analisis Implementasi Sistem Pelaporan Keuangan Daerah Pada BPKAD Kota Kendari**”. Proposal magang ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia atau Sarjana (S1). Adapun tujuan dari dibuatnya proposal magang ini adalah untuk mengasah kemampuan dalam keterampilan umum, menambah wawasan serta keterampilan khusus yang dapat membantu penulis dalam memperoleh pengalaman dan keahlian kerja pada penerapan etika profesi dan budaya kerja yang dibutuhkan di masa akan datang.

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Muskam dan Ibu Sri Martati. Terima kasih yang tak terhingga atas segala doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tiada henti, serta segala pengorbanan yang telah diberikan kepada saya hingga sampai di titik ini. Terima kasih juga untuk keluarga besar saya terutama sepupu-sepupu saya yang selalu memberikan dukungan.
2. Kepada Kakak saya Desty urfan dan Adik saya Sifa, Fika. Terima Kasih atas doa dan dukungannya yang luar biasa. Terima kasih sudah menjadi penghibur dan penyemangat di kala penat dalam mengerjakan proposal ini.
3. Bapak Arief Rahman S.E., M.Com., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dalam proses penyusunan proposal magang ini,
4. Teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam upaya penyelesaian proposal magang ini,
5. BPKAD yang telah memberikan saya kesempatan magang dan memberikan data yang saya perlukan
6. Seseorang yang tidak bisa disebutkan, terimakasih sudah menjadi tempat cerita, keluh kesah serta memberikan semangat, doa dan dukungan.
7. Serta pihak-pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu atas bantuannya secara langsung maupun tidak langsung sehingga proposal magang ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dari penyusunan proposal magang ini, penulis menyadari bahwa proposal ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran positif diharapkan oleh penulis dalam mengembangkan proposal ini, sehingga dapat menjadi sebuah karya tulis yang sempurna dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain

Kendari, 2026

Helmalia Ainun Putri

NIM 22312258

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Magang.....	5
1.4 Manfaat Magang.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah	7
2.1.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah	7
2.1.2 Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	8
2.1.3 Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah.....	8
2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	9
2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	9
2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	10
2.2.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	11
2.3 Sistem Informasi Keuangan Daerah	12
2.3.1 Pengertian Sistem Informasi Keuangan Daerah	12
2.3.2 Peran Sistem Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.....	13
2.3.3 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).....	14
2.4 Aplikasi MERARE (Manajemen Administrasi Keuangan dan Aset Berbasis Elektronik).....	15
2.4.1 Pengertian Aplikasi MERARE	15
2.4.2 Tujuan Penggunaan MERARE.....	16
2.4.3 Fungsi MERARE.....	17
2.5 Penelitian Terdahulu.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian	21

3.2 Sumber dan Data Penelitian	21
3.3 Teknik Pengumpulan Data	22
3.4 Teknik Analisis Data	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Profil Tempat Magang	26
4.1.1 Visi.....	27
4.1.2 Misi.....	27
4.1.3 Struktur Organisasi BPKAD Kota Kendari.....	27
4.2 Aktivitas Magang	29
4.2.1 Tempat dan Waktu Kegiatan Magang	29
4.2.2 Data Peserta	29
4.2.3 Perkembangan Pelaksanaan Magang.....	29
4.2.4 Ketercapaian Aktivitas Magang	31
4.3 Hasil Penelitian.....	35
4.3.1 Implementasi dan Mekanisme Sistem Pelaporan Keuangan MERARE	35
4.3.2 Manfaat dan Efektivitas Sistem MERARE	39
4.3.3 Kendala dan Upaya Penyelesaian Sistem MERARE	43
4.4 Pembahasan	46
BAB V PENUTUP	48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Implikasi dan Rekomendasi.....	49
5.2.1 Implikasi	49
5.2.2 Rekomendasi	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4. 1 Ketercapaian Aktivitas Magang	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003)	13
Gambar 4. 1 Peta Analisis Implementasi dan Mekanisme Sistem MERARE.....	36
Gambar 4. 2 Peta Analisis Manfaat dan Efektivitas Sistem MERARE	40
Gambar 4. 3 Peta Analisis Kendala dan Upaya Penyelesaian Sistem MERARE	43

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PELAPORAN KEUANGAN MERARE PADA BPKAD KOTA KENDARI

Oleh: Helmalia Ainun Putri

Dibimbing Oleh: Arief Rahman, S.E., SIP., M.Com., Ph.D.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem pelaporan keuangan MERARE pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari. Penelitian dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi pelaporan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur dengan lima informan, dan pengamatan penggunaan aplikasi MERARE. Data sekunder diperoleh dari dokumen keuangan, peraturan, pedoman aplikasi, buku, dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan bantuan NVivo melalui tahapan reduksi data, coding, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MERARE mampu mengubah proses pelaporan keuangan dari metode manual menjadi sistem digital berbasis web yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Sistem ini meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, kemudahan akses data, akurasi pelaporan, serta efektivitas kerja pegawai. Namun, implementasi MERARE masih menghadapi kendala berupa gangguan sistem, keterbatasan jaringan internet, dan masalah pengunggahan dokumen. Untuk mengatasi kendala tersebut, BPKAD Kota Kendari melakukan koordinasi, pendampingan pengguna, dan pemantauan sistem secara berkala.

Kata kunci: MERARE, Pelaporan Keuangan, BPKAD, Sistem Informasi, Keuangan Daerah

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah mengelola berbagai sumber penerimaan seperti pendapatan asli daerah, dana transfer dari pemerintah pusat, serta sumber penerimaan lainnya yang digunakan untuk menjalankan program pembangunan daerah. Setiap penggunaan anggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat sekaligus sebagai dasar untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah (Zega et al., 2025). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan daerah, realisasi anggaran, serta posisi aset dan kewajiban pemerintah daerah (Yalabi, 2021).

Pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan administrasi keuangan. Salah satu regulasi yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur penyajian laporan keuangan pemerintah berbasis akrual. Selain itu, proses pengelolaan keuangan daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan tahapan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah.

Upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga tercermin melalui hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023, sebanyak 493

dari 546 pemerintah daerah atau sekitar 90,3% memperoleh opini WTP (BPK, 2024). Meskipun terjadi peningkatan, hasil pemeriksaan BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti kesalahan pencatatan transaksi, keterlambatan penyusunan laporan, serta kelemahan dalam pengendalian internal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan yang berlaku, tetapi juga berkaitan dengan cara pengelolaan administrasi keuangan serta penggunaan teknologi dalam proses pengolahan data keuangan.

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan aplikasi digital dalam pengelolaan keuangan. Penggunaan sistem informasi dalam administrasi keuangan daerah membantu proses pencatatan transaksi serta pengolahan data keuangan sehingga pekerjaan administrasi dapat dilakukan lebih cepat. Kardina et al. (2024) menjelaskan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi dalam sektor publik membantu organisasi pemerintah dalam mengelola data keuangan serta menyusun laporan keuangan secara lebih efisien. Pemanfaatan teknologi juga berkaitan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran utama dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. BPKAD bertugas melakukan koordinasi dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan penatausahaan keuangan, serta penyusunan laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat maupun lembaga pemeriksa. Pelaksanaan tugas tersebut memerlukan dukungan administrasi keuangan dan aplikasi pengolahan data yang digunakan dalam kegiatan pencatatan dan pengolahan transaksi keuangan (Rohmi, 2025).

Dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah, Pemerintah Kota Kendari melalui BPKAD menggunakan aplikasi MERARE (Manajemen Administrasi Keuangan dan Aset Berbasis Elektronik). Aplikasi ini berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah secara elektronik. Secara khusus, MERARE digunakan untuk melakukan pencocokan serta verifikasi kesesuaian data keuangan yang tercatat dalam Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui penggunaan aplikasi ini, proses pengecekan dan pencocokan data keuangan antara dokumen administrasi dengan data yang tercatat dalam sistem dapat dilakukan dengan lebih cepat sehingga membantu kegiatan pelaporan keuangan pada perangkat daerah.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada BPKAD Kota Kendari, diketahui bahwa aplikasi MERARE telah digunakan oleh beberapa perangkat daerah dalam kegiatan administrasi keuangan. Hasil wawancara pendahuluan dengan staf pada bidang akuntansi dan pelaporan menunjukkan bahwa aplikasi tersebut digunakan untuk melakukan pengecekan dan pencocokan data keuangan yang tercatat dalam SIPD serta membantu proses pengolahan data laporan keuangan. Bendahara perangkat daerah yang diwawancarai juga menyampaikan bahwa penggunaan aplikasi MERARE membantu proses verifikasi data sebelum penyusunan laporan keuangan dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti proses input data yang memerlukan ketelitian tinggi, keterbatasan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan beberapa fitur aplikasi, serta gangguan jaringan yang terkadang mempengaruhi proses penginputan dan pengecekan data keuangan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Binawati & Nindyaningsih (2022) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Utari & Harahap (2024) menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi pada instansi pemerintah membantu mempercepat proses pengolahan data keuangan serta penyusunan laporan keuangan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Iestari & Hastuti (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan penggunaan sistem informasi keuangan daerah dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia serta dukungan organisasi dalam penggunaan aplikasi keuangan.

Sebagian penelitian tersebut membahas penerapan sistem informasi keuangan daerah secara umum. Kajian yang secara khusus membahas implementasi aplikasi MERARE dalam proses pelaporan keuangan pemerintah daerah, terutama pada BPKAD Kota Kendari masih terbatas. Dengan demikian, penulis tertarik untuk

mengkaji lebih lanjut dalam sebuah laporan yang berjudul “Analisis Implementasi Sistem Pelaporan Keuangan MERARE pada BPKAD Kota Kendari.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, pelaporan keuangan daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan pemerintah yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan aplikasi MERARE pada BPKAD Kota Kendari digunakan untuk membantu proses pencatatan transaksi keuangan serta penyusunan laporan keuangan perangkat daerah. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi, seperti proses penginputan data, kemampuan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi, serta kendala teknis yang mempengaruhi kegiatan pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam laporan magang ini adalah:

1. Bagaimana implementasi sistem pelaporan keuangan MERARE pada BPKAD Kota Kendari?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pelaporan keuangan MERARE pada BPKAD Kota Kendari?

1.3 Tujuan Magang

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari kegiatan magang ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi sistem pelaporan keuangan MERARE pada BPKAD Kota Kendari.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pelaporan keuangan MERARE pada BPKAD Kota Kendari.

1.4 Manfaat Magang

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung dalam kegiatan administrasi dan pelaporan keuangan pada instansi pemerintahan.

- b. Menambah wawasan serta pengetahuan mahasiswa mengenai penerapan sistem pelaporan keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi MERARE.
 - c. Melatih mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dalam kegiatan kerja di instansi pemerintahan.
- 2. Bagi BPKAD Kota Kendari
 - a. Menjadi bahan masukan bagi instansi dalam melihat pelaksanaan penggunaan aplikasi MERARE dalam kegiatan administrasi dan pelaporan keuangan daerah.
 - b. Memberikan gambaran mengenai kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi MERARE sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan daerah.
- 3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indonesia
 - a. Memperkuat hubungan kerja sama antara perguruan tinggi dengan instansi pemerintahan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa.
 - b. Menjadi bahan evaluasi bagi fakultas dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program magang sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi mahasiswa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap keuangan daerah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup seluruh tahapan administrasi keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Devinci et al. (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan program kerja pemerintah daerah dalam bentuk angka-angka yang berkaitan dengan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui APBD, pemerintah daerah merencanakan berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Selanjutnya, Armereo (2021) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pejabat yang bertugas di bidang keuangan dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pencatatan, pengeluaran, serta pertanggungjawaban keuangan. Pendapat ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan pengaturan anggaran, tetapi juga melibatkan koordinasi antar pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengelolaan tersebut dilaksanakan agar penggunaan keuangan daerah dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan negara.

2.1.2 Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah agar pemerintah daerah dapat mengelola serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran daerah kepada pihak yang memiliki kepentingan yang sah, baik lembaga pengawas maupun masyarakat. Melalui pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah dapat menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara terarah serta menggunakan sumber daya keuangan secara tepat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sumber utama pembiayaan kegiatan pemerintahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan perangkat daerah (Hasugian et al., 2021).

2.1.3 Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Jannah et al. (2025), terdapat beberapa prinsip yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan value for money.

1. Transparansi

Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan anggaran kepada masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses penyusunan serta pelaksanaan anggaran daerah karena anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penggunaan anggaran publik. Proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta lembaga pengawas.

3. Value for Money

Prinsip value for money berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah yang memperhatikan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Aspek ekonomi

berkaitan dengan penggunaan sumber daya dengan biaya yang wajar. Aspek efisiensi berkaitan dengan penggunaan dana masyarakat untuk menghasilkan keluaran yang maksimal. Sedangkan aspek efektivitas berkaitan dengan penggunaan anggaran yang mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam program pembangunan daerah.

2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Taufiqurrohman et al. (2021), laporan keuangan daerah merupakan catatan informasi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu entitas. Laporan keuangan daerah disusun secara terstruktur sehingga dapat menunjukkan posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja serta kondisi keuangan suatu organisasi pemerintahan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bersifat umum. Entitas pelaporan tersebut meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, serta organisasi lain yang berada di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Winarna (2024) menyatakan bahwa laporan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, serta kinerja keuangan selama satu periode tertentu yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sementara itu, Wiguna et al. (2024) menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan media pertanggungjawaban kepala daerah atas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta penggunaan anggaran daerah selama suatu periode tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Krisfiany (2024), tujuan umum laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat serta mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan pemerintah juga bertujuan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan terhadap sumber daya yang telah dipercayakan.

Jusmani et al. (2022) mengemukakan beberapa tujuan laporan keuangan pemerintah daerah antara lain sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, serta ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, serta ekuitas dana pemerintah selama satu periode pelaporan.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, serta penggunaan sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
4. Menyediakan informasi mengenai tingkat kesesuaian antara realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya serta memenuhi kebutuhan kas.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai berbagai aktivitas pemerintahan.

2.2.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Hartoto et al. (2025), laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari tujuh jenis laporan utama yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan selama satu periode pelaporan serta perbandingannya dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan ini digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran serta menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menggambarkan perubahan saldo anggaran lebih dari awal hingga akhir periode pelaporan serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Laporan ini menunjukkan posisi saldo anggaran lebih pada awal tahun, perubahan yang terjadi selama tahun berjalan, serta saldo anggaran lebih pada akhir periode.

3. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah daerah pada tanggal tertentu, yaitu pada akhir periode akuntansi. Neraca memuat informasi mengenai aset yang dimiliki pemerintah daerah, kewajiban yang harus dipenuhi, serta ekuitas dana yang dimiliki.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh aktivitas operasional pemerintah daerah selama satu periode pelaporan yang berbasis akrual. Laporan ini memuat informasi mengenai pendapatan dan beban yang terjadi selama periode tersebut sehingga dapat menggambarkan kinerja operasional pemerintah daerah.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode pelaporan yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Laporan ini

digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan serta menggunakan kas.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas selama satu periode pelaporan. Perubahan tersebut dapat terjadi akibat surplus atau defisit operasional, koreksi kesalahan periode sebelumnya, maupun perubahan kebijakan akuntansi.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas Laporan Keuangan berisi penjelasan secara rinci mengenai pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama serta kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Catatan ini memberikan informasi tambahan sehingga laporan keuangan dapat dipahami dengan lebih jelas oleh para pengguna laporan.

2.3 Sistem Informasi Keuangan Daerah

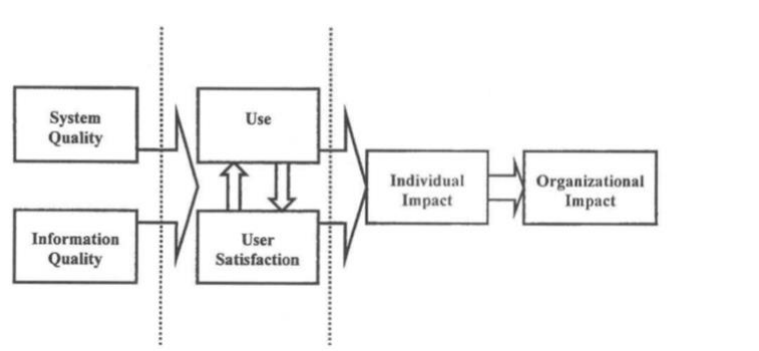
2.3.1 Pengertian Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem informasi pada dasarnya merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sofitri (2023) menjelaskan bahwa sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sistem informasi keuangan daerah digunakan untuk membantu pengelolaan data yang berkaitan dengan kegiatan keuangan pemerintah daerah. Sistem ini digunakan dalam berbagai tahapan pengelolaan keuangan daerah, seperti penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pencatatan transaksi keuangan, hingga penyusunan laporan keuangan daerah. Melalui sistem informasi tersebut, data keuangan dapat diolah secara lebih cepat dan tersimpan dengan baik sehingga memudahkan proses penelusuran kembali apabila diperlukan.

Keberhasilan suatu sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dijelaskan melalui model kesuksesan sistem informasi yang dikemukakan oleh

DeLone dan McLean (2003). Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem informasi dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu kualitas sistem (system quality), kualitas informasi (information quality), penggunaan sistem (use), kepuasan pengguna (user satisfaction), dampak bagi individu (Individual Impact), dampak bagi organisasi (Organizational Impact). Kualitas sistem berkaitan dengan kemampuan sistem dalam menjalankan fungsinya dengan baik, sedangkan kualitas informasi berkaitan dengan ketepatan, kelengkapan, serta kemudahan informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Apabila sistem memiliki kualitas yang baik dan mampu menghasilkan informasi yang akurat, maka sistem tersebut dapat digunakan secara optimal oleh para pengguna dalam menjalankan pekerjaannya.



Gambar 2. 1 Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003)

2.3.2 Peran Sistem Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam melakukan berbagai kegiatan administrasi keuangan. Sistem informasi membantu proses pencatatan transaksi keuangan menjadi lebih tertib karena setiap transaksi yang terjadi dapat langsung dicatat ke dalam sistem. Hal ini membantu mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi ketika pengolahan data dilakukan secara manual (Septiani & Isnawaty, 2024).

Selain itu, sistem informasi juga membantu proses pengolahan dan penyajian data keuangan sehingga informasi yang dihasilkan dapat diperoleh dengan lebih cepat. Informasi keuangan yang tersimpan dalam sistem dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memantau pelaksanaan anggaran serta menyusun laporan keuangan pada akhir periode anggaran. Dengan adanya sistem informasi, data keuangan yang dihasilkan juga lebih mudah ditelusuri kembali

apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan maupun evaluasi (Septiani & Isnawaty, 2024).

Menurut DeLone dan McLean (2003), penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan kualitas sistem dan kualitas informasi yang dihasilkan. Sistem yang mudah digunakan dan memiliki kemampuan pengolahan data yang baik akan membantu pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain itu, informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut harus akurat dan dapat dipercaya sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan maupun dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Apabila sistem informasi mampu menghasilkan informasi yang jelas dan mudah dipahami, maka pengguna sistem akan merasa terbantu dalam melaksanakan tugasnya dan penggunaan sistem tersebut dapat memberikan manfaat bagi organisasi.

2.3.3 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, SIPD merupakan sistem informasi yang mencakup perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah lainnya yang diselenggarakan secara terintegrasi. Sistem ini dikembangkan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola data pemerintahan secara lebih terstruktur sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan pemerintahan daerah.

Secara teknis, SIPD berfungsi untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah berbagai data pemerintahan daerah menjadi informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan dari sistem ini juga dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terdiri atas beberapa kelompok informasi, yaitu:

1. Informasi pembangunan daerah

SIPD digunakan untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah. Melalui sistem ini, pemerintah daerah dapat menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Informasi yang terdapat dalam sistem ini mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, kondisi ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah.

2. Informasi keuangan daerah

SIPD juga digunakan untuk mengelola data keuangan daerah yang berkaitan dengan proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta penyusunan laporan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam sistem ini meliputi perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pertanggungjawaban barang milik daerah, serta informasi keuangan daerah lainnya. Melalui sistem ini, pengkodean kegiatan dan pos anggaran dapat dilakukan secara lebih rinci sehingga pelaporan keuangan dapat disusun secara lebih cepat dan akurat.

3. Informasi pemerintahan daerah lainnya

SIPD juga menyediakan berbagai informasi umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Informasi tersebut dapat berupa laporan penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun, peraturan daerah, serta berbagai informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan daerah.

2.4 Aplikasi MERARE (Manajemen Administrasi Keuangan dan Aset Berbasis Elektronik)

2.4.1 Pengertian Aplikasi MERARE

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 33 Tahun 2023, MERARE (Manajemen Administrasi Keuangan dan Aset Berbasis Elektronik) merupakan penerapan sistem informasi pemerintah melalui digitalisasi administrasi

yang memanfaatkan teknologi berbasis website untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari.

Aplikasi MERARE digunakan untuk mendukung kegiatan pengadministrasian yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan barang milik daerah serta pengelolaan arsip pembayaran atau transaksi keuangan. Melalui aplikasi ini, berbagai dokumen administrasi yang sebelumnya disimpan dalam bentuk fisik dapat dikelola dalam bentuk digital sehingga memudahkan proses pencatatan, pengarsipan, serta pencarian kembali dokumen yang diperlukan oleh perangkat daerah.

Penerapan aplikasi MERARE juga merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan penggunaan aplikasi ini, kegiatan administrasi yang berkaitan dengan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan melalui media elektronik yang terintegrasi.

2.4.2 Tujuan Penggunaan MERARE

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 33 Tahun 2023, tujuan penerapan MERARE adalah untuk memberikan kemudahan dalam proses pelayanan administrasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD). Selain itu, aplikasi ini juga digunakan sebagai media penyimpanan arsip pembayaran atau transaksi keuangan bagi seluruh pihak yang terlibat di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.

Melalui penggunaan aplikasi tersebut, perangkat daerah dapat menyampaikan usulan kebutuhan barang milik daerah secara elektronik sehingga proses pengajuan dan pemeriksaan dokumen dapat dilakukan dengan lebih cepat. Dokumen yang berkaitan dengan transaksi keuangan juga dapat disimpan dalam bentuk arsip digital sehingga memudahkan proses penyimpanan serta penelusuran dokumen apabila dibutuhkan pada saat pemeriksaan atau pelaporan.

Dengan adanya aplikasi MERARE, kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan melalui satu media

elektronik sehingga membantu perangkat daerah dalam mengelola dokumen administrasi secara lebih tertib.

2.4.3 Fungsi MERARE

Aplikasi MERARE memiliki beberapa fungsi dalam kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan dokumen transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Kendari. Fungsi tersebut berkaitan dengan proses penginputan data, pengelolaan dokumen, serta verifikasi administrasi yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Salah satu fungsi utama MERARE adalah sebagai sarana pengelolaan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD). Melalui aplikasi ini, pengurus barang pada masing-masing SKPD dapat menginput data usulan kebutuhan barang serta mengunggah dokumen pendukung yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan barang milik daerah.

Fungsi lainnya adalah sebagai media penyimpanan arsip digital yang berkaitan dengan pembayaran atau transaksi keuangan perangkat daerah. Bendahara pengeluaran pada setiap SKPD melakukan penginputan dokumen pertanggungjawaban atas belanja barang atau jasa ke dalam aplikasi MERARE. Dokumen tersebut kemudian diperiksa oleh pejabat yang bertugas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran data yang diinput.

Selain itu, aplikasi MERARE juga mendukung proses verifikasi dan persetujuan dokumen yang diajukan oleh perangkat daerah. Pejabat yang memiliki kewenangan melakukan penelaahan terhadap dokumen yang telah diinput sebelum dokumen tersebut disetujui atau ditolak. Setelah melalui proses verifikasi, dokumen yang telah disetujui akan ditindaklanjuti dengan pengesahan oleh pejabat yang berwenang.

Melalui fungsi tersebut, aplikasi MERARE digunakan sebagai sarana pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan barang milik daerah serta pengelolaan arsip transaksi keuangan pada setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.

2.5 Penelitian Terdahulu

Peninjauan terhadap penelitian sebelumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti. Melalui penelaahan terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti dapat melihat hasil penelitian yang relevan serta perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil penelusuran referensi, terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan sistem informasi keuangan pemerintah serta pelaporan keuangan daerah. Penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Gustina, 2021	Variabel Independen: Sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah. Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,349 yang menunjukkan bahwa 34,9% kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut.
2	Rahman, 2023	Variabel Independen: Implementasi sistem aplikasi keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SAKTI pada KPPN Semarang I telah berjalan

		tingkat instansi (SAKTI). Variabel Dependen: Pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.	dengan baik dan memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan tugas serta aktivitas kerja di instansi tersebut.
3	Arif, 2024	Variabel Independen: Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI). Variabel Dependen: Proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKD Kabupaten Karanganyar belum menggunakan SIPD RI secara penuh pada proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah pada tahun anggaran 2023. Namun secara umum instansi tersebut dinilai telah memiliki kesiapan yang cukup untuk menerapkan SIPD RI pada tahun anggaran 2024.
4	Puspitasari, 2025	Variabel Independen: Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Variabel Dependen: Efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan serta meningkatkan transparansi informasi keuangan daerah. Namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan jaringan

			internet dan keterbatasan fitur pada sistem.
5	Maryam, 2021	Variabel Independen: Implementasi aplikasi Siskeudes. Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan desa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Siskeudes berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa dengan persentase implementasi sebesar 76,325% dan kualitas laporan keuangan sebesar 86,08%. Implementasi aplikasi Siskeudes memberikan pengaruh sebesar 60,6% terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Ramdhan (2021), penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang bersifat alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Penelitian ini berfokus pada penggambaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan tanpa melakukan perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan sistem pelaporan keuangan melalui aplikasi MERARE pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana aplikasi MERARE digunakan dalam kegiatan administrasi keuangan dan kendala yang dihadapi oleh pegawai dalam penggunaan aplikasi MERARE selama kegiatan pelaporan keuangan berlangsung. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti menggambarkan pengalaman pengguna aplikasi, proses kerja yang dilakukan, serta kondisi yang terjadi selama penggunaan aplikasi tersebut dalam kegiatan administrasi keuangan di lingkungan BPKAD Kota Kendari.

3.2 Sumber dan Data Penelitian

Menurut Safarudin et al. (2023), sumber data merupakan subjek dari mana data penelitian diperoleh. Sementara itu, Ardyan et al. (2023) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan serta interaksi peneliti selama melaksanakan kegiatan magang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari. Data ini diperoleh melalui kegiatan observasi terhadap aktivitas administrasi keuangan, wawancara dengan pegawai yang terlibat dalam kegiatan pelaporan keuangan, serta pengamatan terhadap

penggunaan aplikasi MERARE dalam kegiatan verifikasi dan pengolahan data keuangan.

Wawancara dilakukan kepada lima orang informan yang terlibat dalam kegiatan pelaporan keuangan pada BPKAD Kota Kendari. Informan tersebut terdiri dari 1 orang bidang akuntansi, 1 orang bidang Evaluasi dan Pelaporan, 1 orang bidang Akuntansi Pengeluaran, serta 2 orang Penata Layanan Operasional. Informan tersebut dipilih karena terlibat secara langsung dalam kegiatan pengolahan data keuangan serta penggunaan aplikasi MERARE dalam kegiatan administrasi keuangan daerah.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen serta sumber tertulis yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan keuangan daerah dan penggunaan aplikasi MERARE. Data ini digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen administrasi keuangan, peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, pedoman penggunaan aplikasi MERARE, serta dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan keuangan pada BPKAD Kota Kendari. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem informasi keuangan daerah dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ramdhan (2021), pengumpulan data merupakan tahap yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Data yang diperoleh menjadi dasar dalam proses analisis dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan yang berlangsung di lingkungan BPKAD Kota Kendari selama pelaksanaan magang. Melalui observasi ini, peneliti melihat secara langsung bagaimana

aktivitas administrasi keuangan dilakukan serta bagaimana aplikasi MERARE digunakan dalam kegiatan pelaporan keuangan perangkat daerah.

Kegiatan observasi dilakukan terhadap proses penginputan dokumen administrasi, pengecekan data keuangan, serta kegiatan verifikasi dokumen yang dilakukan oleh pegawai pada bidang akuntansi dan pelaporan. Observasi ini memberikan gambaran mengenai alur kerja yang dilakukan oleh pegawai serta penggunaan aplikasi MERARE dalam kegiatan administrasi keuangan sehari-hari.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh penjelasan secara langsung dari pegawai yang menggunakan aplikasi MERARE dalam kegiatan pelaporan keuangan. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk memberikan penjelasan secara lebih luas mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berkaitan dengan pelaksanaan penggunaan aplikasi MERARE, proses penginputan dan verifikasi data keuangan, serta kendala yang dihadapi selama penggunaan aplikasi dalam kegiatan administrasi keuangan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan lima orang informan tersebut meliputi Kepala Bidang Akuntansi, Koordinator Subid Evaluasi dan Pelaporan, Koordinator Subid Akuntansi pengeluaran, dan dua staf penata layanan operasional yang terlibat dalam kegiatan pelaporan keuangan pada BPKAD Kota Kendari. Hasil wawancara kemudian dicatat dan direkam untuk digunakan dalam proses analisis data.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan administrasi dan pelaporan keuangan di BPKAD Kota Kendari. Dokumen yang dikumpulkan antara lain pedoman penggunaan aplikasi MERARE, dokumen administrasi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, serta arsip yang berkaitan dengan kegiatan verifikasi dokumen keuangan perangkat daerah.

Dokumen tersebut digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta memberikan gambaran mengenai proses administrasi keuangan yang dilakukan oleh instansi.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Ramdhan (2021), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal proses pengumpulan data hingga penelitian selesai dilakukan. Analisis data dilakukan dengan menata, mengelompokkan, dan menafsirkan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo untuk membantu pengelolaan dan pengelompokan data hasil wawancara. Langkah-langkah analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data

Tahap awal analisis data dilakukan dengan menghimpun seluruh data yang diperoleh selama kegiatan penelitian berlangsung. Data tersebut berasal dari hasil observasi, wawancara dengan informan, serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan keuangan pada BPKAD Kota Kendari.

2. Reduksi Data

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan diseleksi dan disederhanakan agar lebih terarah pada fokus penelitian. Data yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan sistem pelaporan keuangan MERARE tidak digunakan dalam proses analisis, sedangkan data yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi dan kendala penggunaannya dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut.

Data hasil wawancara kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk teks sebelum dimasukkan ke dalam perangkat lunak NVivo. Melalui NVivo, data tersebut diberi kode (*coding*) berdasarkan topik yang berkaitan dengan implementasi sistem dan kendala penggunaan aplikasi.

3. Penyajian Data

Setelah proses reduksi dilakukan, data yang telah dikelompokkan kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi sehingga dapat menggambarkan bagaimana

aplikasi MERARE digunakan dalam kegiatan pelaporan keuangan pada BPKAD Kota Kendari.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan yang diperoleh selama penelitian mengenai pelaksanaan sistem pelaporan keuangan melalui aplikasi MERARE serta kendala yang dihadapi oleh pegawai dalam penggunaannya di lingkungan BPKAD Kota Kendari.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Tempat Magang

Nama Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kota Kendari

Alamat Instansi : Jalan Drs. H. Abd Silondae No. 8 Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara (Gedung Menara Balai Kota
Kendari Lt 3-4)

Website : <https://www.kendarikota.go.id/>

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Instansi ini bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pengawasan keuangan daerah yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BPKAD Kota Kendari berperan sebagai unsur pendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Dalam pelaksanaan tugasnya, BPKAD tidak hanya mengelola administrasi keuangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, BPKAD Kota Kendari juga melakukan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu bentuk implementasinya adalah penggunaan sistem pelaporan keuangan berbasis digital, yaitu MERARE, yang digunakan untuk memfasilitasi penyampaian dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban (SPJ) secara elektronik. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempermudah pengelolaan data, serta mempercepat proses pelaporan dan pemeriksaan keuangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKAD Kota Kendari didukung oleh struktur organisasi yang jelas serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Dengan dukungan tersebut,

BPKAD diharapkan mampu memberikan pelayanan administrasi keuangan yang optimal serta mendukung terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

4.1.1 Visi

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

4.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPKAD Kota Kendari menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Mewujudkan tata kelola aset daerah yang optimal, akurat, dan berdaya guna sebagai bagian dari kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan secara maksimal.
3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur BPKAD melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
4. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terintegrasi serta berbasis teknologi informasi guna mendukung pelayanan publik yang prima.
5. Memperkuat pengawasan dan pengendalian internal dalam setiap proses pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mencegah penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik.

4.1.3 Struktur Organisasi BPKAD Kota Kendari

Adapun struktur organisasi BPKAD Kota Kendari terdiri atas:

1. Kepala BPKAD

Merupakan pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Sekretariat

Bertugas mendukung kegiatan administrasi dan operasional organisasi, yang terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
- 3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bertugas dalam penyusunan dan evaluasi anggaran daerah, terdiri dari:

 - a. Subbidang Kebijakan dan Evaluasi Anggaran
 - b. Subbidang Penyusunan Anggaran
- 4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bertanggung jawab dalam pengelolaan kas daerah dan pelaksanaan transaksi keuangan, terdiri dari:

 - a. Subbidang Penatausahaan dan Verifikasi
 - b. Subbidang Pelaksanaan dan Pengeluaran
 - c. Subbidang Kas Daerah
- 5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Bertugas dalam pencatatan, penyusunan, serta evaluasi laporan keuangan daerah, terdiri dari:

 - a. Subbidang Akuntansi Pemerintah Daerah
 - b. Subbidang Penyusunan Laporan Keuangan
 - c. Subbidang Konsolidasi dan Evaluasi
- 6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Bertanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah, terdiri dari:

 - a. Subbidang Inventarisasi Aset
 - b. Subbidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
 - c. Subbidang Pengamanan dan Penghapusan
- 7. Bidang Pendapatan

Mengelola pendapatan daerah, terdiri dari:

 - a. Subbidang Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - b. Subbidang Pendapatan Lainnya
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari tenaga profesional seperti analis keuangan, verifikator, auditor internal, serta pengelola barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas teknis sesuai bidang keahlian masing-masing.

4.2 Aktivitas Magang

4.2.1 Tempat dan Waktu Kegiatan Magang

Nama Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kota Kendari
Alamat : Jalan Drs. H. Abd Silondae No. 8 Kota Kendari, Sulawesi
Tenggara (Gedung Menara Balai Kota Kendari Lt 3-4)
Divisi : Akuntansi
Periode Magang : 4 bulan (01 Oktober 2025 – 31 Januari 2026)

4.2.2 Data Peserta

Nama : Helmalia Ainun Putri
NIM : 22312258
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis dan Ekonomika
Universitas : Islam Indonesia
No. Tlp : 085242202404
Email : 22312258@students.uii.ac.id

4.2.3 Perkembangan Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan kegiatan magang merupakan bagian dari penyusunan Tugas Akhir yang wajib ditempuh sebagai salah satu syarat penyelesaian studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam aktivitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah di instansi pemerintahan, sehingga dapat memahami secara nyata penerapan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

Penulis melaksanakan kegiatan magang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari, khususnya pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Kegiatan magang dilaksanakan selama empat bulan, yaitu dimulai pada tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Januari 2026. Selama periode tersebut, penulis mengikuti seluruh aktivitas kerja yang berlangsung di unit kerja serta terlibat dalam kegiatan administrasi pelaporan keuangan daerah.

Kegiatan magang dilaksanakan selama lima hari kerja, yaitu dari hari Senin sampai dengan Jumat, dengan jam kerja dimulai pukul 08.00 WITA sampai dengan

16.00 WITA. Waktu istirahat pada hari Senin sampai Kamis berlangsung pukul 12.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA, sedangkan pada hari Jumat waktu istirahat dimulai pukul 11.30 WITA sampai dengan 13.00 WITA. Selama kegiatan magang berlangsung, penulis mengikuti arahan dari pembimbing lapangan serta mematuhi ketentuan kerja yang berlaku, termasuk dalam hal kedisiplinan waktu dan kerapian berpakaian.

Pada awal pelaksanaan magang, penulis melakukan pengenalan dengan pegawai di Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta memperoleh penjelasan mengenai struktur organisasi BPKAD Kota Kendari. Dalam tahap ini, penulis juga mendapatkan gambaran mengenai tugas dan fungsi masing-masing bagian, khususnya yang berkaitan dengan proses penyusunan dan pelaporan keuangan daerah. Selain itu, penulis diperkenalkan dengan aplikasi MERARE sebagai sistem utama yang digunakan dalam kegiatan pelaporan keuangan serta hubungannya dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pada minggu pertama pelaksanaan magang, penulis berada pada tahap orientasi dan penyesuaian terhadap lingkungan kerja serta sistem yang digunakan. Penulis memperoleh penjelasan mengenai alur pelaporan keuangan daerah, mulai dari penyusunan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) oleh bendahara perangkat daerah, proses pengunggahan dokumen ke dalam sistem MERARE, hingga tahap verifikasi yang dilakukan oleh staf BPKAD. Pada tahap ini, penulis juga mulai mengamati bagaimana proses pengecekan kesesuaian data dilakukan antara dokumen SPJ dengan data yang tercatat dalam SIPD dan Buku Kas Umum (BKU).

Seiring dengan berjalannya waktu, penulis mulai memahami alur kerja yang diterapkan dalam sistem MERARE serta peran masing-masing pihak yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan. Penulis mengamati secara langsung bagaimana bendahara OPD menginput dan mengunggah dokumen dalam bentuk PDF ke dalam sistem, serta bagaimana staf akuntansi dan penata layanan operasional melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian data yang disampaikan. Selain itu, penulis juga memahami mekanisme pengembalian dokumen apabila ditemukan ketidaksesuaian, serta proses perbaikan yang dilakukan oleh OPD.

Memasuki minggu-minggu berikutnya, penulis mulai dilibatkan dalam beberapa aktivitas operasional di bawah arahan pegawai, seperti membantu proses administrasi, mengamati kegiatan verifikasi dokumen, serta mempelajari proses sinkronisasi data antara MERARE dengan SIPD dan BKU. Melalui keterlibatan tersebut, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya ketelitian dalam pemeriksaan dokumen serta peran sistem informasi dalam menjaga akurasi laporan keuangan daerah.

Selain itu, penulis juga mengamati berbagai kendala yang terjadi selama penggunaan sistem MERARE, seperti gangguan jaringan internet, munculnya error pada sistem, serta kendala dalam pengunggahan dokumen dengan ukuran file yang besar. Penulis melihat secara langsung bagaimana pegawai BPKAD melakukan koordinasi dengan bendahara OPD untuk mengatasi kendala tersebut, baik melalui komunikasi langsung maupun melalui media komunikasi seperti telepon dan pesan singkat.

Secara keseluruhan, perkembangan pelaksanaan magang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman penulis terhadap proses pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, khususnya dalam penggunaan sistem MERARE. Pengalaman ini tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai alur kerja administrasi keuangan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dinamika kerja di instansi pemerintahan serta pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelaporan keuangan daerah.

4.2.4 Ketercapaian Aktivitas Magang

Berikut ini rincian aktivitas magang yang telah penulis lakukan:

Tabel 4. 1 Ketercapaian Aktivitas Magang

Tanggal	Aktivitas Magang	Output
Minggu 1 01 Oktober s/d 03 Oktober 2025	- Pengenalan lingkungan kerja, struktur organisasi BPKAD Kota Kendari, serta tugas dan fungsi Bidang Akuntansi dan Pelaporan. - Pengenalan dokumen keuangan daerah seperti SPJ, BKU, dan dokumen pendukung lainnya.	Memahami struktur organisasi, tugas masing-masing bagian, serta jenis dokumen dan sistem yang

Tanggal	Aktivitas Magang	Output
	• Pengenalan sistem MERARE sebagai media pelaporan keuangan berbasis digital.	digunakan dalam pelaporan keuangan daerah.
Minggu 2 06 Oktober s/d 10 Oktober 2025	• Mempelajari alur pelaporan keuangan daerah dari OPD ke BPKAD. • Mengamati proses pengunggahan dokumen SPJ ke dalam sistem MERARE. • Mengamati proses verifikasi awal dokumen oleh staf.	Memahami alur pelaporan keuangan serta mekanisme penggunaan sistem MERARE.
Minggu 3 13 Oktober s/d 17 Oktober 2025	• Membantu pengecekan kelengkapan dokumen SPJ yang telah diunggah. • Membantu mengelompokkan dokumen berdasarkan OPD. • Mengikuti proses pencocokan data SPJ dengan BKU.	Mampu mengenali kelengkapan dokumen serta memahami proses awal verifikasi laporan keuangan.
Minggu 4 20 Oktober s/d 24 Oktober 2025	• Membantu proses administrasi dokumen pelaporan. • Melakukan pengarsipan dokumen SPJ dalam bentuk digital. • Membantu pengecekan kesesuaian nominal pada dokumen transaksi.	Mampu melakukan pengarsipan dokumen serta memahami pentingnya ketelitian dalam pemeriksaan data.
Minggu 5 27 Oktober s/d 01 November 2025	• Membantu verifikasi dokumen SPJ secara lebih rinci. • Melakukan pencatatan data SPJ pada file kerja (Excel). • Membantu mengidentifikasi dokumen yang belum lengkap.	Mampu melakukan pengecekan dokumen secara lebih sistematis serta mencatat hasil verifikasi.
Minggu 6	• Terlibat dalam proses pencocokan data antara SPJ dengan SIPD.	Memahami proses sinkronisasi data

Tanggal	Aktivitas Magang	Output
03 November s/d 07 November 2025	• Membantu pengecekan kesesuaian saldo BKU. • Menginput data sederhana hasil verifikasi.	dan mampu membantu pengecekan kesesuaian data keuangan.
Minggu 7 10 November s/d 14 November 2025	• Membantu proses verifikasi SPJ pengeluaran. • Melakukan pengecekan bukti transaksi terhadap laporan yang diunggah. • Mengelompokkan dokumen yang perlu perbaikan.	Mampu melakukan verifikasi dasar serta mengidentifikasi kesalahan dalam laporan keuangan.
Minggu 8 17 November s/d 21 November 2025	• Melakukan pengecekan dan verifikasi dokumen SPJ secara mandiri di bawah pengawasan. • Mencatat hasil temuan ketidaksesuaian dokumen. • Membantu menginput status verifikasi pada sistem MERARE.	Meningkatkan kemandirian dalam proses verifikasi serta mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian data.
Minggu 9 24 November s/d 28 November 2025	• Melakukan input data laporan SPJ ke dalam file kerja. • Membantu proses pengunggahan dokumen ke sistem MERARE. • Melakukan pengarsipan dokumen digital.	Mampu melakukan input dan pengelolaan dokumen secara mandiri.
Minggu 10 01 Desember s/d 05 Desember 2025	• Melakukan pencocokan data SPJ dengan data pada SIPD dan BKU. • Membantu proses rekapitulasi laporan bulanan. • Menyusun dokumen berdasarkan periode pelaporan.	Data laporan tersusun rapi dan sesuai antar sistem.

Tanggal	Aktivitas Magang	Output
Minggu 11 08 Desember s/d 12 Desember 2025	• Membantu proses evaluasi laporan keuangan OPD. • Mengidentifikasi laporan yang belum lengkap. • Melakukan follow-up dokumen yang perlu perbaikan.	Mampu melakukan evaluasi sederhana terhadap laporan keuangan.
Minggu 12 15 Desember s/d 19 Desember 2025	• Melakukan verifikasi lanjutan terhadap SPJ. • Membantu proses koreksi dokumen yang tidak sesuai. • Mengarsipkan dokumen hasil verifikasi.	Meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan dan koreksi laporan.
Minggu 13 22 Desember s/d 26 Desember 2025	• Membantu pencatatan data laporan pengeluaran. • Melakukan pengecekan kesesuaian nilai transaksi. • Menyusun dokumen berdasarkan jenis belanja.	Data transaksi tersusun lebih sistematis dan mudah ditelusuri.
Minggu 14 29 Desember s/d 02 Januari 2026	• Terlibat dalam persiapan closing akhir tahun. • Membantu pengecekan kelengkapan laporan akhir tahun. • Melakukan pengarsipan dokumen periode akhir tahun.	Memahami proses closing dan pentingnya kelengkapan laporan akhir tahun.
Minggu 15 05 Januari s/d 09 Januari 2026	• Membantu proses rekonsiliasi data laporan keuangan. • Melakukan pencocokan data antar dokumen. • Menginput hasil rekonsiliasi ke dalam file kerja.	Data keuangan menjadi lebih akurat dan sesuai.

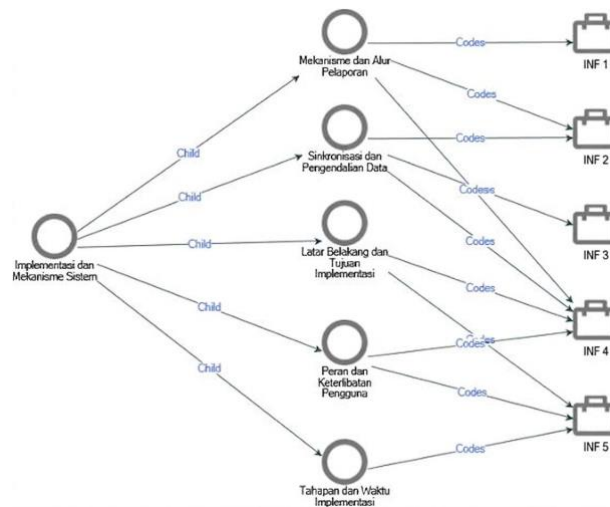
Tanggal	Aktivitas Magang	Output
Minggu 16 12 Januari s/d 16 Januari 2026	• Melakukan verifikasi laporan periode berjalan. • Membantu input data SPJ baru. • Melakukan pengarsipan dokumen terbaru.	Mampu menangani laporan periode berjalan secara mandiri.
Minggu 17 19 Januari s/d 23 Januari 2026	• Melakukan pengecekan dokumen sebelum diunggah. • Membantu proses penginputan data ke sistem. • Menyusun dokumen berdasarkan nomor dan tanggal.	Dokumen tersusun rapi dan siap untuk proses verifikasi.
Minggu 18 26 Januari s/d 30 Januari 2026	• Melakukan verifikasi akhir terhadap laporan. • Membantu penyelesaian administrasi pelaporan. • Melakukan pengarsipan keseluruhan dokumen magang.	Seluruh dokumen terselesaikan dengan baik dan siap untuk kebutuhan administrasi serta evaluasi.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Implementasi dan Mekanisme Sistem Pelaporan Keuangan MERARE

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 33 Tahun 2023, tujuan penerapan MERARE adalah untuk memberikan kemudahan dalam proses pelayanan administrasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD). Implementasi sistem MERARE di lingkungan BPKAD Kota Kendari menunjukkan perubahan menyeluruh dalam pengelolaan pelaporan keuangan daerah, khususnya pada proses penyampaian dan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban. Perubahan ini tidak hanya mengalihkan media pelaporan dari kertas ke digital, tetapi juga membentuk pola kerja yang lebih terstruktur.

Implementasi tersebut meliputi aspek sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.1 di bawah ini.



Gambar 4. 1 Peta Analisis Implementasi dan Mekanisme Sistem MERARE

Sumber : Analisis Data NVivo

1. Latar Belakang dan Tujuan Implementasi

Latar belakang penerapan sistem MERARE berangkat dari kondisi pengelolaan laporan keuangan yang sebelumnya masih menggunakan dokumen fisik dalam jumlah besar. Penggunaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berbasis kertas menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan tingginya biaya operasional untuk pencetakan dokumen, kebutuhan ruang penyimpanan arsip, serta lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas administrasi keuangan daerah, metode manual tersebut tidak lagi mampu memenuhi tuntutan efisiensi dan kecepatan kerja. Tumpukan dokumen fisik tidak hanya menyulitkan dalam proses pengarsipan, tetapi juga memperlambat proses pencarian kembali dokumen ketika dibutuhkan untuk keperluan pemeriksaan atau evaluasi.

Kondisi ini mendorong diterapkannya sistem MERARE sebagai solusi berbasis digital yang dirancang untuk mengatasi berbagai keterbatasan tersebut. Sistem ini bertujuan untuk mereduksi penggunaan kertas, menghemat anggaran operasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap ruang penyimpanan fisik. Selain itu, sistem ini juga diarahkan untuk memangkas

waktu yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan dokumen, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat.

2. Tahapan dan Waktu Implementasi

“Penerapan sistem MERARE dilakukan melalui tahapan yang terencana dan tidak bersifat instan. Sistem ini mulai dibangun dan dikembangkan pada tahun 2023 sebagai fase awal sebelum akhirnya digunakan secara efektif dalam kegiatan operasional pada tahun 2024.” (Informan 1)

“Rentang waktu tersebut menunjukkan adanya proses persiapan yang mencakup pengembangan infrastruktur sistem serta penyesuaian sumber daya manusia. Tahap awal difokuskan pada pembangunan aplikasi dan pengujian sistem agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Setelah sistem dinilai siap, dilakukan penerapan secara bertahap hingga akhirnya digunakan secara menyeluruh oleh seluruh OPD.” (Informan 1)

“Proses ini juga menjadi bagian dari upaya adaptasi pegawai terhadap perubahan sistem kerja. Peralihan dari metode manual ke digital menuntut adanya penyesuaian dalam cara penyusunan laporan, mekanisme pengiriman dokumen, serta proses pemeriksaan. Dengan adanya tahapan implementasi yang jelas, penggunaan sistem MERARE dapat berjalan lebih stabil karena pengguna telah memiliki pemahaman terhadap alur kerja yang baru.” (Informan 4)

3. Mekanisme dan Alur Pelaporan

“Mekanisme pelaporan dalam sistem MERARE dilakukan secara daring dan mengikuti alur yang telah ditetapkan dalam sistem. Proses ini diawali oleh bendahara pada masing masing OPD yang bertanggung jawab menyusun dokumen SPJ sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen tersebut kemudian dikonversi ke dalam format PDF sebelum diunggah ke dalam sistem MERARE.” (Informan 5)

“Setelah dokumen berhasil diunggah, data akan tersimpan secara otomatis dalam basis data sistem yang terpusat. Selanjutnya, tim operasional BPKAD yang terdiri dari staf akuntansi dan penata layanan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut. Proses pemeriksaan dilakukan

secara langsung melalui sistem tanpa memerlukan pertukaran dokumen fisik, sehingga alur kerja menjadi lebih sederhana dan efisien.”(Informan 1)

“Mekanisme ini juga memungkinkan setiap tahapan pelaporan dapat dipantau secara real time. Dokumen yang telah diunggah dapat langsung diperiksa, dikoreksi, atau dikembalikan kepada OPD jika ditemukan ketidaksesuaian. Dengan demikian, proses pelaporan tidak hanya menjadi lebih cepat, tetapi juga lebih terkontrol karena setiap tahapan memiliki alur yang jelas dalam sistem.” (Informan 2)

“Penggunaan sistem ini juga memberikan kemudahan dalam penelusuran dokumen, karena seluruh laporan tersimpan dalam satu platform yang terorganisir. Hal ini mengurangi ketergantungan pada arsip fisik yang sebelumnya memerlukan waktu lebih lama untuk dicari dan diverifikasi.” (Informan 2)

4. Sinkronisasi dan Pengendalian Data

“Salah satu aspek utama dalam implementasi sistem MERARE adalah kemampuannya dalam mendukung sinkronisasi data keuangan dengan sistem lain yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dokumen SPJ yang telah diunggah tidak hanya diperiksa dari sisi kelengkapan administratif, tetapi juga dibandingkan dengan data transaksi yang tercatat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta saldo Buku Kas Umum (BKU).” (Informan 3)

“Proses perbandingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. Melalui mekanisme ini, ketidaksesuaian data dapat dideteksi sejak awal sehingga dapat segera dilakukan perbaikan sebelum laporan disahkan.”(Informan 3)

“Pengendalian data menjadi lebih sistematis karena setiap dokumen yang masuk harus melalui proses verifikasi yang terintegrasi dengan sistem lain. Hal ini membantu meningkatkan keandalan data serta meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelaporan keuangan.”(Informan 4)

“Selain itu, proses sinkronisasi ini juga memperkuat fungsi pengawasan karena setiap transaksi yang dilaporkan dapat ditelusuri kembali berdasarkan data yang tersedia dalam sistem. Dengan demikian, sistem

MERARE tidak hanya berfungsi sebagai media pelaporan, tetapi juga sebagai alat pengendalian keuangan yang terintegrasi.” (Informan 5)

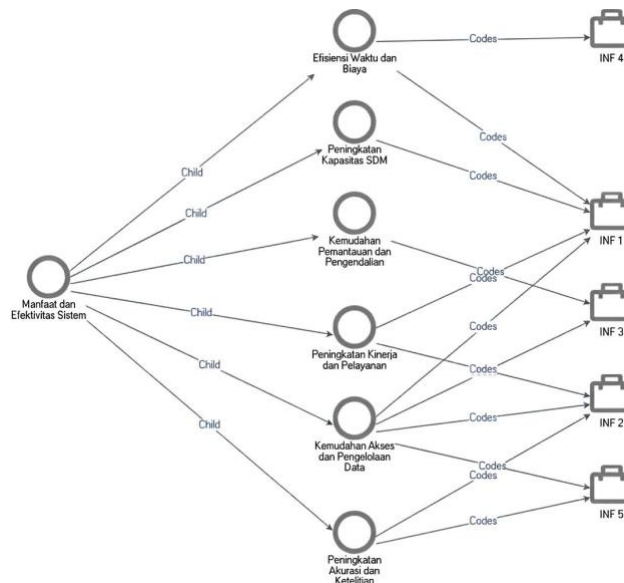
5. Peran dan Keterlibatan Pengguna

“Keberhasilan implementasi sistem MERARE sangat ditentukan oleh keterlibatan berbagai pihak yang memiliki peran masing masing dalam proses pelaporan. Bendahara OPD bertindak sebagai pihak yang menyusun dan mengunggah dokumen SPJ ke dalam sistem. Setelah itu, staf akuntansi dan penata layanan operasional bertugas melakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen yang masuk.” (Informan 1)

“Proses ini kemudian diawasi oleh koordinator subbidang yang memastikan bahwa laporan disampaikan sesuai dengan ketentuan dan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Pada tahap akhir, Kepala Bidang Akuntansi memiliki peran dalam melakukan evaluasi serta pengendalian terhadap keseluruhan proses pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi MERARE tidak hanya bergantung pada sistem itu sendiri, tetapi juga pada koordinasi dan tanggung jawab antar pengguna.” (Informan 1)

4.3.2 Manfaat dan Efektivitas Sistem MERARE

Implementasi sistem MERARE di lingkungan BPKAD Kota Kendari tidak hanya memberikan perubahan pada mekanisme pelaporan keuangan, tetapi juga menghasilkan berbagai manfaat yang berdampak langsung terhadap efektivitas kinerja organisasi. Manfaat tersebut mencakup beberapa aspek sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.2 di bawah ini.



Gambar 4. 2 Peta Analisis Manfaat dan Efektivitas Sistem MERARE

Sumber : Analisis Data NVivo

1. Efisiensi Waktu dan Biaya

Penerapan sistem MERARE memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan pelaporan keuangan, baik dari segi waktu maupun biaya operasional. Sebelum sistem ini diterapkan, proses penyampaian dokumen pertanggungjawaban masih dilakukan secara manual dengan menggunakan dokumen fisik dalam jumlah besar. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk pencetakan, penggandaan, serta penyediaan alat tulis kantor. Selain itu, kebutuhan ruang penyimpanan arsip juga menjadi semakin besar seiring dengan meningkatnya volume dokumen yang harus disimpan.

Setelah diterapkannya sistem MERARE, proses pelaporan mengalami perubahan secara menyeluruh menjadi berbasis digital. Dokumen tidak lagi dicetak, melainkan dikonversi ke dalam format elektronik dan diunggah melalui sistem. Hal ini secara langsung mengurangi penggunaan kertas dan biaya operasional lainnya. Dari sisi waktu, proses penyampaian laporan menjadi jauh lebih singkat karena bendahara OPD tidak perlu lagi datang secara langsung untuk menyerahkan dokumen. Cukup dengan melakukan unggah dokumen, laporan sudah dapat diterima dan diproses oleh BPKAD.

2. Kemudahan Akses dan Pengelolaan Data

Sistem MERARE yang berbasis web memberikan kemudahan dalam hal akses dan pengelolaan data keuangan. Sistem ini dapat diakses melalui berbagai perangkat kerja selama terhubung dengan jaringan internet, sehingga memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam menjalankan tugasnya tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.

Seluruh dokumen pelaporan yang telah diunggah akan tersimpan dalam sistem secara terpusat dalam bentuk arsip digital. Penyimpanan ini membuat data lebih terorganisir dan mudah untuk dikelola. Pegawai dapat dengan mudah mencari, menelusuri, serta menggunakan kembali data historis yang dibutuhkan dalam proses evaluasi maupun penyusunan laporan lanjutan.

Dibandingkan dengan metode manual yang mengharuskan pencarian dokumen secara fisik, sistem ini *значительно* mempercepat proses penelusuran data karena dilengkapi dengan fitur pencarian yang terintegrasi. Hal ini juga mempermudah penyusunan kertas kerja karena data yang diperlukan dapat langsung diakses melalui sistem tanpa harus membuka berkas satu per satu.

3. Peningkatan Akurasi dan Ketelitian

Penggunaan sistem MERARE memberikan kontribusi terhadap peningkatan akurasi dan ketelitian dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh adanya format pelaporan yang baku dan terstruktur dalam sistem, sehingga setiap OPD diwajibkan untuk mengikuti standar yang telah ditentukan.

Standarisasi ini berfungsi untuk mengurangi variasi dalam penyusunan laporan serta meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penginputan data. Selain itu, sistem juga memungkinkan dilakukannya verifikasi secara lebih sistematis karena dokumen yang diperiksa memiliki struktur yang seragam.

Proses pemeriksaan menjadi lebih terarah karena data dalam laporan dapat langsung dibandingkan dengan data transaksi yang tercatat dalam sistem lain seperti SIPD dan BKU. Dengan adanya mekanisme ini,

ketidaksesuaian data dapat dideteksi lebih awal sehingga dapat segera dilakukan perbaikan.

4. Kemudahan Pemantauan dan Pengendalian

Sistem MERARE memberikan kemudahan dalam melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap proses pelaporan keuangan. Melalui sistem ini, setiap dokumen yang diunggah dapat dipantau statusnya secara langsung, mulai dari tahap pengiriman, pemeriksaan, hingga verifikasi akhir.

Fitur pemantauan ini memungkinkan pengguna untuk mengetahui laporan yang belum disampaikan, yang masih memerlukan perbaikan, maupun yang telah disetujui. Dengan demikian, proses pengawasan menjadi lebih transparan dan terstruktur.

Selain itu, sistem ini juga membantu dalam proses pengendalian karena setiap tahapan pelaporan telah diatur secara sistematis dalam aplikasi. Hal ini membuat alur kerja menjadi lebih jelas dan memudahkan dalam melakukan tindak lanjut terhadap laporan yang belum sesuai.

5. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan

Implementasi sistem MERARE memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja pegawai serta kualitas pelayanan administrasi di lingkungan BPKAD. Proses pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan membutuhkan interaksi langsung kini dapat dilakukan secara daring, sehingga mengurangi hambatan administratif.

Dengan adanya sistem ini, proses koordinasi antar unit kerja menjadi lebih efektif karena tidak lagi bergantung pada pertemuan fisik. Selain itu, proses pemeriksaan dan koreksi laporan dapat dilakukan secara lebih cepat, sehingga mempercepat penyelesaian administrasi secara keseluruhan.

Dampak dari peningkatan efisiensi ini juga dirasakan oleh OPD sebagai pengguna layanan, terutama dalam hal kemudahan penyampaian laporan dan percepatan proses administrasi, termasuk dalam pencairan anggaran.

6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

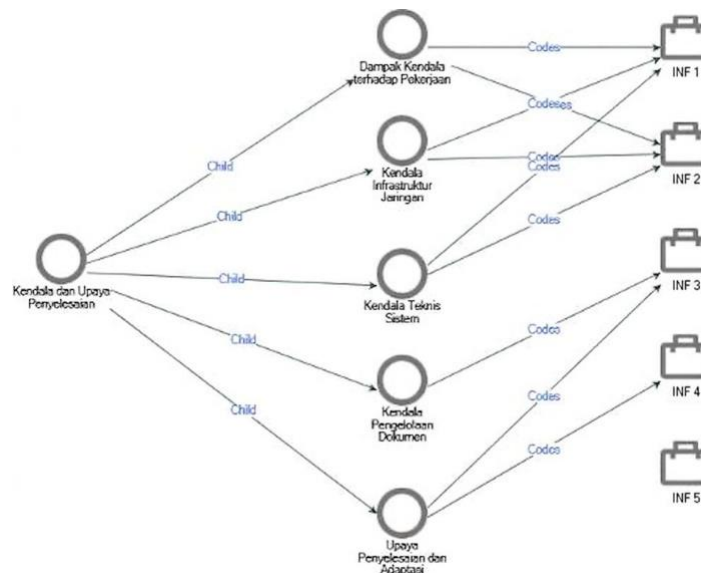
Selain memberikan manfaat dalam aspek teknis, implementasi sistem MERARE juga berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya

manusia di lingkungan BPKAD. Peralihan dari sistem manual ke sistem digital menuntut pegawai untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Proses adaptasi ini secara tidak langsung meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan sistem, melakukan analisis data, serta memahami alur kerja berbasis digital. Seiring dengan penggunaan sistem secara berkelanjutan, pegawai menjadi lebih terbiasa dan terampil dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pekerjaan mereka.

4.3.3 Kendala dan Upaya Penyelesaian Sistem MERARE

Implementasi sistem MERARE di lingkungan BPKAD Kota Kendari, meskipun telah memberikan berbagai manfaat dalam meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan, masih dihadapkan pada sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, BPKAD juga melakukan berbagai upaya penyelesaian dan adaptasi agar sistem tetap dapat berjalan secara optimal. Keterkaitan antara kendala dan upaya penyelesaian tersebut membentuk satu rangkaian dinamika implementasi sistem yang ditunjukkan pada Gambar 4.3 di bawah ini.



Gambar 4. 3 Peta Analisis Kendala dan Upaya Penyelesaian Sistem MERARE

Sumber : Analisis Data NVivo

1. Kendala Teknis Sistem

Dalam pelaksanaannya, sistem MERARE masih menghadapi berbagai kendala teknis yang berasal dari sistem itu sendiri. Kendala tersebut antara lain

berupa munculnya *error* atau *bug* pada aplikasi, serta adanya gangguan operasional akibat proses pemeliharaan sistem (*maintenance*). Kondisi ini menyebabkan sistem tidak dapat diakses dalam waktu tertentu, sehingga aktivitas pelaporan dan pemeriksaan dokumen menjadi terhambat. Kendala teknis ini menjadi cukup krusial mengingat sistem MERARE telah menjadi media utama dalam proses pelaporan keuangan. Ketika sistem mengalami gangguan, seluruh aktivitas yang bergantung pada aplikasi tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2. Kendala Infrastruktur Jaringan

Selain kendala teknis pada sistem, hambatan lain yang dihadapi dalam implementasi MERARE adalah keterbatasan infrastruktur jaringan. Sebagai sistem yang berbasis web, operasional MERARE sangat bergantung pada kestabilan koneksi internet. Ketika jaringan mengalami gangguan atau tidak stabil, akses terhadap sistem menjadi terganggu. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem digital tidak hanya ditentukan oleh kualitas aplikasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan infrastruktur jaringan yang memadai. Tanpa koneksi internet yang stabil, proses pelaporan tidak dapat dilakukan secara optimal.

3. Kendala Pengelolaan Dokumen

Kendala lain yang dihadapi dalam penggunaan sistem MERARE berkaitan dengan pengelolaan dokumen, khususnya dalam proses pengunggahan file. Dokumen SPJ yang diunggah oleh bendahara OPD sering kali memiliki ukuran file yang cukup besar karena memuat berbagai lampiran bukti transaksi dalam bentuk hasil pemindaian. Ukuran file yang besar ini sering menyebabkan kegagalan dalam proses unggah dokumen atau penolakan oleh sistem. Kondisi ini menuntut adanya kemampuan tambahan dari pengguna, khususnya bendahara OPD, untuk melakukan pengelolaan dokumen seperti kompresi file agar sesuai dengan ketentuan sistem.

4. Dampak Kendala terhadap Pekerjaan

Berbagai kendala yang terjadi dalam implementasi sistem MERARE memberikan dampak terhadap kelancaran proses kerja di lingkungan BPKAD. Gangguan sistem, masalah jaringan, serta kendala dalam pengunggahan

dokumen dapat menyebabkan tertundanya proses pemeriksaan dan verifikasi laporan keuangan. Ketika sistem tidak dapat digunakan, seluruh aktivitas pelaporan menjadi terhenti, sehingga menimbulkan penumpukan pekerjaan yang harus diselesaikan pada waktu berikutnya. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada internal BPKAD, tetapi juga memengaruhi OPD sebagai pihak yang menyampaikan laporan. Dampak yang lebih luas terlihat pada terhambatnya proses administrasi, termasuk dalam pencairan anggaran yang bergantung pada kelengkapan dan verifikasi dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa kendala dalam sistem tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki implikasi terhadap kinerja pelayanan secara keseluruhan.

5. Upaya Penyelesaian dan Adaptasi

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kota Kendari bersama BPKAD Kota Kendari melakukan berbagai upaya penyelesaian dan adaptasi agar sistem MERARE tetap dapat digunakan secara optimal. Upaya yang dilakukan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melalui peningkatan dukungan kebijakan dan koordinasi antar instansi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pihak BPKAD dengan bendahara OPD, sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, Pemerintah Kota Kendari juga mendukung perbaikan sarana pendukung seperti jaringan.

Staf operasional secara aktif melakukan pendampingan kepada pengguna, khususnya ketika terjadi kendala dalam proses pelaporan, seperti kegagalan unggah dokumen. Pendampingan ini dilakukan melalui komunikasi langsung, baik secara tatap muka maupun melalui media komunikasi seperti telepon dan pesan singkat.

Selain itu, pimpinan bidang juga berperan dalam melakukan pemantauan terhadap penggunaan sistem serta mengidentifikasi kendala yang muncul. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap permasalahan dapat segera ditindaklanjuti dan tidak menghambat proses pelaporan secara keseluruhan.

4.4 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem MERARE pada BPKAD Kota Kendari merupakan bentuk transformasi digital dalam pengelolaan pelaporan keuangan daerah yang sejalan dengan konsep pemanfaatan sistem informasi dalam sektor publik. Perubahan dari sistem manual ke sistem berbasis elektronik tidak hanya berdampak pada media pelaporan, tetapi juga pada struktur kerja, pola koordinasi, serta mekanisme pengendalian administrasi keuangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Kardina et al. (2024) yang menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi dalam instansi pemerintah mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data keuangan serta mempercepat proses penyusunan laporan keuangan. Dalam penelitian ini, sistem MERARE terbukti mampu menyederhanakan proses pelaporan melalui digitalisasi dokumen SPJ, sehingga alur penyampaian dan pemeriksaan laporan menjadi lebih cepat dan terintegrasi.

Dari aspek implementasi, penerapan MERARE menunjukkan bahwa keberhasilan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (2003) yang menekankan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, serta penggunaan sistem oleh pengguna menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan suatu sistem informasi. Pada BPKAD Kota Kendari, kualitas sistem tercermin dari kemampuan MERARE dalam mengelola data secara terpusat dan terintegrasi dengan SIPD, sedangkan kualitas informasi terlihat dari meningkatnya akurasi dan konsistensi data laporan keuangan. Selain itu, tingkat penggunaan sistem oleh bendahara OPD dan staf BPKAD menunjukkan bahwa sistem telah diterima sebagai bagian dari proses kerja sehari-hari, meskipun masih memerlukan penyesuaian dalam penggunaannya.

Manfaat yang dihasilkan dari implementasi MERARE juga menunjukkan kesesuaian dengan teori mengenai peran sistem informasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Septiani dan Isnawaty (2024) menjelaskan bahwa sistem informasi mampu mengurangi kesalahan pencatatan serta mempercepat proses pengolahan data keuangan. Temuan dalam penelitian ini memperkuat pendapat tersebut, di mana penggunaan MERARE mampu menekan biaya operasional, mengurangi penggunaan kertas, serta mempercepat proses verifikasi

laporan. Selain itu, kemudahan akses data yang dihasilkan dari sistem berbasis web juga mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang merupakan prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik (Jannah et al., 2025).

Namun demikian, implementasi sistem MERARE belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Kendala teknis seperti error sistem dan maintenance, keterbatasan jaringan internet, serta masalah pengelolaan dokumen menunjukkan bahwa keberhasilan sistem informasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung di luar sistem itu sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian Puspitasari dan Manurung (2025) yang menyatakan bahwa kendala utama dalam penerapan sistem informasi keuangan daerah sering kali berasal dari keterbatasan infrastruktur jaringan dan fitur sistem yang belum optimal. Dalam penelitian ini, ketergantungan terhadap koneksi internet menjadi faktor krusial karena sistem MERARE berbasis web, sehingga gangguan jaringan secara langsung berdampak pada terhentinya proses pelaporan.

Dampak dari kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Terhambatnya proses verifikasi laporan menyebabkan penumpukan pekerjaan serta keterlambatan dalam penyelesaian administrasi keuangan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi proses pencairan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem informasi memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung kelancaran operasional organisasi, sehingga setiap gangguan yang terjadi dapat memberikan efek yang cukup luas. Hal ini sejalan dengan konsep net benefits dalam model DeLone dan McLean (2003), di mana manfaat sistem akan optimal apabila sistem dapat berjalan secara stabil tanpa gangguan yang signifikan.

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, upaya penyelesaian yang dilakukan oleh BPKAD Kota Kendari menunjukkan pentingnya peran komunikasi dan koordinasi dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem informasi. Pendampingan yang dilakukan oleh staf operasional kepada bendahara OPD serta pemantauan yang dilakukan oleh pimpinan bidang merupakan bentuk adaptasi organisasi dalam menghadapi keterbatasan sistem. Hal ini sesuai dengan pendapat Lestari dan Hastuti (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya

manusia serta dukungan organisasi. Dengan adanya pendampingan dan komunikasi yang intensif, kendala teknis yang muncul dapat diminimalisir sehingga proses pelaporan tetap dapat berjalan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan magang serta analisis terhadap implementasi sistem pelaporan keuangan MERARE pada BPKAD Kota Kendari, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi sistem MERARE di lingkungan BPKAD Kota Kendari telah membawa perubahan dalam proses pelaporan keuangan daerah dari metode manual berbasis dokumen fisik menjadi sistem digital berbasis web. Sistem ini digunakan dalam kegiatan penginputan, pengunggahan, serta verifikasi dokumen pertanggungjawaban (SPJ) yang dilakukan oleh bendahara OPD dan diverifikasi oleh pihak BPKAD. Melalui sistem ini, proses pelaporan menjadi lebih terstruktur, terintegrasi, serta dapat dipantau secara real time sehingga mendukung tertib administrasi keuangan daerah.
2. Penerapan sistem MERARE memberikan berbagai manfaat dalam meningkatkan efektivitas kerja, antara lain efisiensi waktu dan biaya operasional, kemudahan akses serta pengelolaan data, peningkatan akurasi dan ketelitian laporan, serta kemudahan dalam pemantauan dan pengendalian proses pelaporan. Selain itu, sistem ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pegawai serta kapasitas

sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan administrasi keuangan.

3. Dalam pelaksanaannya, implementasi sistem MERARE masih menghadapi beberapa kendala, antara lain kendala teknis sistem seperti error dan maintenance, keterbatasan infrastruktur jaringan internet, serta kendala dalam pengelolaan dokumen khususnya terkait ukuran file yang besar saat proses unggah. Kendala-kendala tersebut berdampak pada keterlambatan proses pelaporan dan verifikasi dokumen, serta dapat mempengaruhi kelancaran administrasi keuangan daerah.
4. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, BPKAD Kota Kendari melakukan upaya penyelesaian melalui peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pengguna, pendampingan kepada bendahara OPD, serta pemantauan penggunaan sistem secara berkala oleh pimpinan. Upaya ini membantu menjaga kelancaran proses pelaporan keuangan meskipun masih terdapat keterbatasan dalam sistem.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

5.2.1 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, implementasi sistem MERARE memberikan implikasi penting terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam aspek administrasi pelaporan keuangan. Penggunaan sistem berbasis digital menunjukkan bahwa transformasi teknologi dalam sektor pemerintahan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem MERARE memungkinkan proses pelaporan dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi, sehingga mendukung pengendalian internal serta meminimalisir kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Selain itu, penerapan sistem ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia serta dukungan infrastruktur yang memadai. Adaptasi pegawai terhadap sistem digital menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penggunaan sistem. Dengan demikian, penggunaan MERARE memberikan gambaran bahwa digitalisasi administrasi keuangan daerah perlu diiringi dengan peningkatan kompetensi

pengguna serta dukungan jaringan yang stabil agar sistem dapat berjalan secara optimal.

5.2.2 Rekomendasi

1. Bagi BPKAD Kota Kendari, disarankan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan internet guna mendukung akses sistem yang lebih stabil. Penyediaan jaringan yang memadai akan membantu mengurangi hambatan dalam proses pelaporan dan verifikasi dokumen.
2. Bagi pengguna sistem, khususnya bendahara OPD, disarankan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan dokumen digital, seperti melakukan kompresi file dan memastikan kelengkapan dokumen sebelum diunggah ke dalam sistem. Hal ini dapat membantu memperlancar proses pelaporan serta mengurangi kesalahan dalam pengunggahan dokumen.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji implementasi sistem MERARE secara lebih luas, misalnya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat efektivitas sistem atau dengan membandingkan implementasi sistem serupa di daerah lain, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan sistem informasi keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, A., Yuliyani, L., Hildawati, H., Suarni, A., Judijanto, L., et al. (2023). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif: Pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif di berbagai bidang*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi sistem informasi pemerintah daerah RI (SIPD RI) dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Akuntansiku*, 3(1), 15–29.
- Armereo, C. (2021). Analisis good corporate governance pada pengelolaan keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang. *EKOMBIS Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 241–254.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2024*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Optimal*, 19(1), 19–39.
- Devinci, M. Y., Dekrita, Y. A., & Samosir, M. S. (2022). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA*, 9(2), 51–70.
- Gustina, I. R. A. (2021). Pengaruh sistem pengendalian intern dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 56–64.

- Hartoto, I., Andriani, A. F., Andriana, N., Nurkhamid, M., Yustiani, S., et al. (2025). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah: Teori dan praktik*. Penerbit Widina.
- Hasugian, F. T., Syahputra, R. A., & Harahap, A. R. (2021). Pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, value for money, kejujuran, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Studi kajian pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Pusat). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 6(2), 175–185.
- Jannah, S. R., Fitriyah, N., & Lenap, I. P. (2025). Prinsip akuntabilitas, transparansi dan value for money dalam pengelolaan keuangan pada masjid (Studi kasus pada Masjid Baitul Gafur di Lingkungan Gebang). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 5(4), 494–504.
- Jusmani, J., Hendri, E., & Kurniawan, T. B. (2022). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 4(2), 199–212.
- Kardina, M., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Penilaian penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan dampaknya terhadap kinerja pelayanan publik di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 615–620.
- Krisfiany, F. (2024). *Analisis laporan arus kas metode langsung sebagai dasar penilaian kinerja keuangan pada PPSDM Migas Cepu* (Doctoral dissertation, Politeknik Harapan Bersama).
- Lestari, S. F., & Hastuti, H. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 11, No. 1, pp. 820–827).
- Maryam, M., Sellang, K., & Erfina, E. (2021). Pengaruh implementasi aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Maiwa. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 9(3), 171–180.
- Puspitasari, D. A., & Manurung, H. (2025). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Akuntansi Pajak Keuangan*, 3(1), 36–42.
- Rahman, S., Hartanto, S., & Harkat, A. (2023). Analisis implementasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI). *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 3(1), 64–72.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

- Rohmi, P. K. (2025). Peran sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 155–162.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694.
- Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2024). Efektivitas sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 7(4), 193–208.
- Soufitri, F. (2023). *Konsep sistem informasi*. PT Inovasi Pratama Internasional.
- Taufiqurrohman, T., Mudawanah, S., & Muthanudin, M. (2021). Pengaruh pemahaman akuntansi dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Lebak. *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis (The Indonesian Journal of Management & Accounting)*, 9(2).
- Utari, R., & Harahap, J. P. R. (2024). Analisis sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(4), 362–376.
- Wiguna, P. G. S., Suryawan, I. G. B., & Widiati, I. A. P. (2024). Mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 259–264.
- Winarna, J. (2024). *Informasi laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah*. Deepublish.
- Yalabi, D. A. (2021). Komponen laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Pitis AKP*, 5(2), 123–129.
- Zega, R., Telaumbanua, A., Bate'e, M. M., & Gulo, H. (2025). Analisis transparansi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nias Utara: Studi kasus pada BPKPD Kabupaten Nias Utara. *Economics and Digital Business Review*, 6(2.1), 361–379.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Transkrip Wawancara 1 : Pak Ikrar Anggara 2 Februari 2026

TRANSKRIP WAWANCARA 1

Narasumber : Pak Ikrar Anggara

Tanggal Wawancara : 2 Februari 2026

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi

P : Sejak Kapan sistem pelaporan keuangan MERARE diterapkan di BPKAD Kota Kendari?

J : Sistem MERARE dibangun pada tahun 2023 dan secara efektif digunakan dalam operasional BPKAD Kota Kendari sejak tahun 2024.

P : Dalam pelaksanaan tugasnya, apakah Kabid Akuntansi juga berhak dalam melakukan evaluasi data dalam Sistem MERARE?

J : Iya, tentu saja karna kabid bagian akuntansi wajib untuk melakukan evaluasi data dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh staf bidang akuntansi, khususnya terhadap SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang dikirimkan melalui sistem.

P : Siapa saja pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan penggunaan sistem MERARE?

J : Pihak yang terlibat secara langsung yaitu bendahara yang secara fungsional memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada BPKAD selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) dan yang terlibat juga tentunya staf-staf akuntansi yang bertugas melakukan pemeriksaan dan koreksi terhadap SPJ yang dikirimkan oleh bendahara melalui aplikasi MERARE.

P : Apa latar belakang dan tujuan utama diterapkannya sistem MERARE di lingkungan BPKAD?

J : Penerapan sistem MERARE dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dokumen pertanggungjawaban keuangan. Sebelumnya, SPJ disampaikan dalam bentuk dokumen fisik berupa fotocopy kertas yang memerlukan biaya cukup besar. Dengan adanya digitalisasi melalui aplikasi MERARE, dokumen pertanggungjawaban seluruh laporan dari masing-masing SKPD dapat dikirim dan disimpan secara elektronik. Tujuan utamanya adalah untuk menghemat anggaran, mengurangi penggunaan kertas dan menghemat waktu dalam pemeriksaan dokumen.

P : Sejauh mana Bapak terlibat langsung dalam penggunaan atau pengawasan pemanfaatan sistem MERARE?

J : Sebagai penanggung jawab di bidang akuntansi, saya berperan aktif dalam melakukan evaluasi, memantau, serta mengidentifikasi kendala apa saja yang muncul selama penggunaan aplikasi MERARE.

P : Apakah menurut Bapak, implementasi MERARE telah memberikan manfaat strategis bagi BPKAD secara kelembagaan?

J : Implementasi MERARE memberikan dampak yang signifikan bagi BPKAD. Sistem ini membantu mengefisienkan anggaran dan mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan arsip dan juga memanfaatkan teknologi. Selain itu, proses penyampaian SPJ menjadi lebih praktis karena bendahara tidak perlu lagi mengirim bisa langsung diupload melalui MERARE, sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan tepat waktu.

LAMPIRAN 2 Transkrip Wawancara 2 : Pak Muchliza 2 Februari 2026

TRANSKRIP WAWANCARA 2

Narasumber : Pak Muchliza

Tanggal Wawancara : 2 Februari 2026

Jabatan : Koordinator Subid Evaluasi dan Pelaporan

P : Bagaimana peran sub bidang evaluasi dan pelaporan dalam penggunaan sistem MERARE?

J : Penggunaan sistem Merare berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian penyampaian SPJ fungsional secara digital. Sistem ini diterapkan karena penyampaian dokumen dalam bentuk fisik sudah tidak lagi memadai untuk mendukung kebutuhan administrasi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, setiap OPD diwajibkan mengunggah dokumen SPJ penerimaan dan pengeluaran dalam format PDF sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Sub bidang tersebut juga bertanggung jawab memastikan bahwa kewajiban penyampaian laporan dilakukan tepat waktu. Pemantauan dilakukan melalui pengecekan langsung pada sistem MERARE. Setelah dokumen masuk, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membandingkan data dalam SPJ dengan bukti transaksi yang tercatat dalam SIPD. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketepatan dan keabsahan informasi yang dilaporkan

P : Seberapa sering Bapak menggunakan MERARE dalam proses evaluasi data keuangan?

J : Sistem MERARE digunakan secara berkala setiap bulan dalam rangka evaluasi laporan keuangan OPD. Proses ini menjadi bagian dari tanggung jawab sub bidang terkait untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian SPJ fungsional yang telah diunggah ke dalam sistem. Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada standar penyajian laporan yang berlaku.

Selain memastikan kelengkapan dokumen, dilakukan pula pencocokan antara transaksi yang tercatat hingga akhir bulan dengan jumlah penerimaan dan belanja yang tertera dalam sistem. Saldo Buku Kas Umum (BKU) yang dilaporkan turut dibandingkan dengan transaksi aktual pada periode tersebut. Dengan cara ini, keakuratan dan konsistensi data dapat terjaga.

P : Apakah Merare membantu Bapak dalam mendeteksi kesalahan atau ketidaksesuaian data?

J : Keberadaan Merare mempermudah proses identifikasi kesalahan karena dokumen SPJ telah disusun menggunakan format baku. Data yang tersedia dalam bentuk PDF memudahkan pencarian informasi dan pencocokan nilai belanja dengan bukti transaksi serta data SP2D yang tercatat dalam BKU dan SIPD. Dengan demikian, ketidaksesuaian dapat diketahui lebih cepat.

P : Sejauh mana sistem ini meningkatkan ketelitian dan efisiensi kerja Bapak?

J : Karena laporan telah tersimpan dalam bentuk digital, proses analisis dapat dilakukan dengan lebih praktis. Penyusunan kertas kerja menjadi lebih sederhana dibandingkan ketika dokumen masih berbentuk manual. Perhitungan nilai transaksi, penerimaan, serta sisa dana juga dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.

P : Bagaimana tingkat kemudahan Merare dalam membantu proses evaluasi laporan keuangan?

J : Sistem ini cukup mudah digunakan karena struktur laporan telah diatur secara jelas dalam aplikasi. Hal tersebut membantu mempercepat proses evaluasi dan memudahkan penelusuran data tanpa harus membuka dokumen fisik.

P : Kendala apa yang paling sering dihadapi saat menggunakan sistem MERARE?

J : Sistem ini cukup mudah digunakan karena struktur laporan telah diatur secara jelas dalam aplikasi. Hal tersebut membantu mempercepat proses evaluasi dan memudahkan penelusuran data tanpa harus membuka dokumen fisik.

LAMPIRAN 3 Transkrip Wawancara 3 : Pak Januar Permana 2 Februari 2026

TRANSKRIP WAWANCARA 3

Narasumber : Pak Januar Permana

Tanggal Wawancara : 2 Februari 2026

Jabatan : Koordinator Subid Akuntansi Pengeluaran

P : Sejauh mana sistem Merare membantu Bapak dalam melakukan pemantauan terhadap data pengeluaran yang belum lengkap atau masih memerlukan tindak lanjut?

J : Melalui MERARE, pemantauan SPJ pengeluaran dapat dilakukan dengan lebih terkontrol. Sistem ini memudahkan dalam mengetahui laporan yang belum disampaikan maupun yang masih memerlukan perbaikan. Apabila terdapat kekurangan, bendahara segera dihubungi untuk menindaklanjuti agar laporan dapat di proses lebih lanjut.

P : Selama penggunaan sistem Merare, kendala apa saja yang paling sering dihadapi, baik dari sisi teknis sistem, jaringan internet, maupun pemahaman pengguna, dan bagaimana langkah yang biasanya dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

J : Hambatan yang sering terjadi berkaitan dengan aspek teknis, terutama ukuran dokumen yang cukup besar saat diunggah. Upaya yang dilakukan adalah memberikan pendampingan serta menjalin komunikasi secara berkala dengan bendahara agar permasalahan dapat segera diselesaikan dan pelaporan tetap sesuai prosedur.

P : Jika dibandingkan dengan metode pencatatan atau sistem yang digunakan sebelum adanya Merare, apakah Bapak merasakan tingkat kepuasan kerja yang lebih baik saat ini, khususnya dalam hal kemudahan, kecepatan, dan ketelitian pengelolaan data pengeluaran?

J : Dibandingkan dengan sistem manual, penggunaan Merare dirasakan lebih efisien. Pengelolaan dokumen tidak lagi bergantung pada berkas fisik dalam jumlah banyak, sehingga lebih praktis dan mudah dikendalikan.

P : Apakah Merare membantu Bapak dalam memantau realisasi anggaran pengeluaran?

J : Merare mempermudah pengawasan realisasi anggaran karena laporan pengeluaran disampaikan secara berkala dan dapat langsung dicocokkan dengan data pada SIPD, termasuk BKU (Buku Kas Umum). Hal ini membuat proses pengendalian anggaran lebih tertata dan sistematis.

P : Bagaimana penggunaan MERARE dalam proses pencatatan pengeluaran?

J : Dalam proses pencatatan pengeluaran, Merare digunakan sebagai media untuk menyampaikan sekaligus mengendalikan dokumen pertanggungjawaban belanja dari masing-masing OPD. Bendahara pengeluaran terlebih dahulu menyusun SPJ sesuai ketentuan, kemudian mengunggahnya ke dalam sistem.

Setelah dokumen masuk, dilakukan pemeriksaan dan pengecekan untuk memastikan bahwa data yang tercantum telah sesuai dengan transaksi dan saldo yang ada. Melalui mekanisme ini, proses pengawasan menjadi lebih terstruktur. Selain itu, sistem MERARE juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan dokumen secara digital sehingga laporan pengeluaran lebih mudah ditelusuri dan dikelola.

**LAMPIRAN 4 Transkrip Wawancara 4 : Pak Fauzhan Fathurachman 3 Februari
2026**

TRANSKRIP WAWANCARA 4

Narasumber : Pak Fauzhan Fathurachman

Tanggal Wawancara : 3 Februari 2026

Jabatan : Penata Layanan Operasional

P : Kendala apa yang paling sering dihadapi dalam penggunaan sistem Merare pada pekerjaan operasional?

J : Hambatan yang sering muncul berkaitan dengan gangguan sistem dan jaringan, seperti aplikasi yang tidak dapat diakses atau adanya proses maintenance yang menyebabkan pekerjaan tertunda.

P : Secara umum, apakah sistem Merare sudah memenuhi kebutuhan kerja Bapak di bagian operasional?

J : MERARE dinilai telah mendukung kebutuhan pekerjaan, terutama dalam proses pemeriksaan SPJ, karena fitur yang tersedia cukup lengkap dan mempercepat proses koreksi.

P : Menurut pengalaman Bapak, apakah penggunaan sistem ini membuat pekerjaan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipantau?

J : Sistem ini membuat alur kerja lebih tertata karena setiap tahapan pemeriksaan sudah tersusun dalam aplikasi, sehingga memudahkan pemantauan dibandingkan cara manual.

P : Menurut penilaian Bapak, apakah manfaat penggunaan sistem Merare sudah dirasakan secara nyata dalam lingkungan kerja?

J : Manfaatnya sudah terlihat jelas, terutama dalam efisiensi waktu dan pengurangan penggunaan dokumen fisik. Kesalahan dapat segera diketahui dan data dapat dicocokkan langsung dengan SIPD.

P : Apakah sistem Merare menyediakan informasi yang lebih rinci, akurat, dan mudah diakses dibandingkan dengan metode manual yang sebelumnya digunakan?

J : Informasi yang ditampilkan dalam Merare lebih detail dan mudah diakses, sehingga proses pemeriksaan menjadi lebih cepat dan terarah dibandingkan sistem manual.

P : Apakah Bapak merasakan adanya peningkatan kemampuan teknis atau keterampilan digital sejak menggunakan sistem Merare?

J : Penggunaan sistem berbasis digital mendorong pegawai untuk lebih terbiasa menggunakan teknologi, termasuk dalam melakukan pencocokan data dan memahami hasil koreksi melalui fitur yang tersedia.

LAMPIRAN 5 Transkrip Wawancara 5 : Ibu Rizki Mulyana 3 Februari 2026

TRANSKRIP WAWANCARA 5

Narasumber : Ibu Rizki Mulyana

Tanggal Wawancara : 3 Februari 2026

Jabatan : Penata Layanan Operasional

P : Secara keseluruhan, bagaimana pandangan Ibu mengenai kontribusi sistem MERARE terhadap kinerja organisasi BPKAD?

J : Secara umum, sistem MERARE dinilai memberi dampak positif terhadap kinerja BPKAD, terutama dalam hal pelaporan dari OPD. Jika sebelumnya dokumen SPJ disampaikan dalam bentuk fisik, kini proses tersebut dapat dilakukan melalui sistem secara daring. Hal ini mempermudah OPD dalam menyampaikan laporan dan memudahkan verifikator dalam melakukan pemeriksaan karena seluruh dokumen tersaji dalam satu aplikasi yang terpusat.

P : Apakah sistem Merare meningkatkan ketepatan dan akurasi laporan keuangan?

J : Penggunaan Merare membantu meningkatkan ketelitian dalam penyusunan laporan keuangan. Sistem telah menyediakan format dan rincian yang harus dipenuhi oleh OPD saat mengunggah laporan. Dengan adanya struktur tersebut, laporan menjadi lebih lengkap dan proses pengecekan dapat dilakukan dengan lebih mudah sehingga kesalahan dapat diminimalkan.

P : Menurut pengalaman Ibu, seberapa sering sistem Merare mengalami gangguan teknis seperti error atau bug?

J : Gangguan teknis seperti error atau bug masih cukup sering terjadi. Ketika hal tersebut muncul, pekerjaan menjadi tertunda karena proses verifikasi tidak dapat dilakukan. OPD juga terdampak, terutama dalam hal pencairan yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu. Selama sistem belum kembali normal, proses administrasi harus menunggu.

P : Menurut pengalaman Ibu, apakah akses sistem Merare cukup mudah digunakan dari berbagai perangkat kerja yang tersedia?

J : Akses terhadap sistem Merare pada dasarnya cukup mudah karena berbasis web dan dapat dibuka melalui perangkat kerja yang tersedia. Selama koneksi internet stabil, pengguna tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi tersebut.

P : Apakah sistem Merare membantu mengurangi kesalahan kerja yang biasanya terjadi saat pencatatan manual?

J : Dibandingkan dengan metode manual, Merare membantu menekan potensi kesalahan. Data yang diunggah bersumber dari sistem yang sudah ada sebelumnya sehingga lebih terkontrol. Kesalahan yang muncul umumnya hanya terkait teknis pengunggahan, sedangkan isi laporan tetap melalui tahap verifikasi sebelum dinyatakan sesuai.

P : Apakah keberadaan sistem Merare berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada unit kerja lain?

J : Keberadaan Merare memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi karena proses pelaporan tidak lagi harus dilakukan secara langsung. OPD dapat menyampaikan dokumen secara daring, sehingga lebih menghemat waktu dan mempercepat penyelesaian administrasi. Hal ini membuat koordinasi menjadi lebih efektif dan pelayanan terasa lebih praktis.

LAMPIRAN 6 Hierarcy Chart

Manfaat dan Efektivitas Sistem			Kendala dan Upaya Penyelesaian	
Kemudahan Akses dan Pengelolaan Data	Peningkatan Akur...	Efisiensi Waktu d...	Upaya Penyelesaian dan Adaptasi	
Peningkatan Kinerja dan Pelayanan	Peningkatan Kapas...	Kemudahan Pem...	Kendala Teknis ...	Kendala Infras...
Implementasi dan Mekanisme Sistem			Dampak Kendala terhadap Pekerja...	
Sinkronisasi dan Pengendalian Data	Peran dan Keterli...	Latar Belakang d...	Kendala Pengelolaan Dokumen	
Mekanisme dan Alur Pelaporan	Tahapan dan Waktu Implementasi			